



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.RB/ 26 / 21 /2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
Tahun 2026

Yth. Camat Petanahan
di
Petanahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Kecamatan Petanahan Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025, tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/278 Tanggal 13 April 2026 untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 13 s.d. 30 April 2026.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Petanahan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2025 dengan dibuktikan laporan progres tindak lanjut.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,30** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30%	20,10	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	20,70	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,50	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100%	68,80	70,30
Tingkat Akuntabilitas			B	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pohon kinerja telah disusun dan telah terdapat pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain, namun belum secara spesifik dan eksplisit menggambarkan keterkaitan masing-masing pihak untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- Target tidak challenge (pemasangan target pada Perjanjian Kinerja Camat tahun 2026 atas indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” lebih rendah dari capaian tahun 2025.

Indikator	Capaian Kinerja (LkjIP 2025)	Perjanjian Kinerja 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	91,59	90,40

2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Belum terdapat SOP Pengumpulan Kinerja atas indikator kinerja yang terdapat pada Renstra 2025-2029.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut: Kecamatan Petanahan telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja belum menginformasikan keseluruhan capaian target kinerja (indikator indeks desa membangun, tidak dimasukkan dalam LKjIP)
- b. LKjIP belum menginformasikan perbandingan capaian kinerja (IKM) dengan capaian IKM level Kabupaten.
- c. Analisis Keberhasilan dan Solusi kurang tepat, seharusnya uraian solusi ditujukan untuk indikator yang tidak tercapai.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang belum secara spesifik menguraikan program apa yang paling menonjol dan mendukung serta yang paling berdampak terhadap pencapaian kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara mendalam.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Petanahan, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Camat Petanahan agar:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun rimbun dan telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang

ditetapkan, dengan **tidak menghubungkan dahulu dengan komponen perencanaan dan hirarki organisasi.**

2. Mengidentifikasi pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi secara spesifik dan eksplisit memperlihatkan peran masing-masing pihak.
3. Merevisi Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2026 dengan memasang target indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” agar lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.
4. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja atas indikator kinerja yang terdapat pada Renstra 2025-2029.
5. Merevisi LKjIP Tahun 2025 dengan menyajikan seluruh informasi kinerja pada LKjIP termasuk indikator “Indeks desa membangun”.
6. Merevisi LKjIP Tahun 2025 dengan menyajikan informasi perbandingan capaian kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan capaian IKM level Kabupaten.
7. Merevisi LKjIP Tahun 2025 dengan menyajikan Analisis Keberhasilan dan Solusi secara tepat pada LKjIP dengan menguraikan solusi atas indikator yang tidak tercapai.
8. Merevisi LKjIP Tahun 2025 dengan melakukan Analisis program/kegiatan yang menunjang dengan menguraikan secara spesifik program apa yang paling menonjol dan mendukung serta paling berdampak terhadap pencapaian kinerja.
9. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan menjadikan hasil evaluasi internal dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang akan diterjemahkan pada rencana aksi tahun berikutnya

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Amin Rahmanurrasjid, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19720723 199803 1 006